

# TRANSFORMASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK INDONESIA: BASIS AKRUAL, DIGITALISASI, DAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN

Agus Kurniawan<sup>1</sup>, Zathu Restie Utami<sup>2</sup>

1,2 Lecturer at the Faculty of Islamic Economics and Business, Raden Intan State Islamic University Lampung

E-mail: [aguskurniawan@radenintan.ac.id](mailto:aguskurniawan@radenintan.ac.id)<sup>1</sup>  
[zathurestieutami@radenintan.ac.id](mailto:zathurestieutami@radenintan.ac.id)<sup>2</sup>

---

## FIDUSIA

*Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan*

ISSN Cetak : 2621-2439

ISSN Online : 2621-2447

**Kata kunci:** *akuntansi sektor publik; basis akrual; digitalisasi pelaporan; audit sektor publik; pelaporan keberlanjutan*

## ABSTRAK

Reformasi pengelolaan keuangan negara mendorong akuntansi sektor publik Indonesia bertransformasi dari basis kas menuju basis akrual, sekaligus menghadapi tuntutan transparansi berbasis data dan agenda pembangunan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan menyintesis isu-isu terkini akuntansi sektor publik dengan menekankan keterkaitan antara kualitas penerapan basis akrual, digitalisasi pelaporan, dan pelaporan keberlanjutan (termasuk informasi iklim/SDGs). Metode yang digunakan adalah studi literatur terstruktur dan analisis dokumen kebijakan (standar akuntansi, regulasi, serta ringkasan hasil pemeriksaan lembaga audit) periode 2015-2025. Hasil sintesis menunjukkan: (1) penerapan akrual cenderung kuat pada kepatuhan penyusunan laporan, namun pemanfaatan informasi akrual untuk pengambilan keputusan dan manajemen aset masih terbatas; (2) opini audit yang membaik belum otomatis mencerminkan peningkatan akuntabilitas kinerja, sehingga dibutuhkan integrasi antara pelaporan keuangan, kinerja, dan tindak lanjut rekomendasi audit; (3) digitalisasi melalui sistem informasi keuangan, open data, dan standarisasi pelaporan (misalnya XBRL) berpotensi meningkatkan keterbandingan dan ketepatan waktu, tetapi menghadirkan risiko tata kelola data, kualitas data, serta keamanan siber; (4) perkembangan standar pelaporan keberlanjutan sektor publik di tingkat internasional membuka peluang perluasan cakupan pelaporan pemerintah atas risiko dan dampak iklim. Artikel mengusulkan kerangka integratif dan peta jalan implementasi yang menyeimbangkan aspek standar, kapabilitas SDM, tata kelola data, dan assurance. Simpulan menekankan bahwa agenda transformasi akuntansi sektor publik perlu bergerak dari 'sekadar patuh' menuju 'bernilai guna' bagi pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas publik.

*Public financial management reforms have transformed Indonesian public sector accounting from cash basis toward accrual basis while facing increasing demands for data-driven transparency and sustainability-related information. This article synthesizes current issues in public sector*

*accounting by focusing on the interlinkages among accrual implementation quality, digital reporting, and sustainability reporting (including climate/SDGs disclosures). Using a structured literature review and policy document analysis (accounting standards, regulations, and audit summary reports) for 2015-2025, the synthesis indicates that: (1) accrual adoption is often strong in report preparation compliance but weaker in decision-usefulness and asset management; (2) improving audit opinions does not automatically translate into stronger performance accountability, calling for tighter integration of financial and performance reporting as well as audit follow-up; (3) digitalization through financial management information systems, open data, and standardized digital reporting (e.g., XBRL) can improve timeliness and comparability but raises data governance, data quality, and cybersecurity risks; and (4) emerging international public sector sustainability reporting standards provide an opportunity to broaden government reporting on climate risks and impacts. The article proposes an integrative framework and an implementation roadmap that balances standards, human-capital capability, data governance, and assurance. The main conclusion is that transformation should move from 'mere compliance' toward 'decision-useful' reporting that strengthens transparency and public accountability.*

## **I. PENDAHULUAN**

Akuntansi sektor publik berada pada pusat agenda reformasi pengelolaan keuangan negara karena laporan keuangan pemerintah menjadi sarana utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada publik, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam praktiknya, tuntutan terhadap akuntabilitas pemerintah semakin kompleks: pemerintah tidak lagi hanya dituntut menyajikan laporan yang sesuai standar, tetapi juga harus mampu menjelaskan efisiensi belanja, kualitas pengelolaan aset, keberlanjutan fiskal, serta dampak program terhadap masyarakat. Kompleksitas tersebut menjadi semakin nyata ketika masih ditemukan permasalahan klasik seperti ketidaktertiban penatausahaan aset, ketidaksinkronan data antarsistem, keterlambatan rekonsiliasi, serta tindak lanjut temuan audit yang belum konsisten di berbagai entitas pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan akuntansi sektor publik bukan semata isu teknis pencatatan, melainkan berkaitan erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Di saat yang sama, lanskap akuntabilitas publik berkembang cepat. Pertama, tuntutan transparansi semakin mengarah pada 'akuntabilitas berbasis data' seiring kebijakan *open government* dan praktik *digital government*. Masyarakat tidak hanya mengharapkan laporan yang patuh standar, tetapi juga informasi yang tepat waktu, mudah diakses, dapat dibandingkan antarentitas, dan dapat ditelusuri kembali ke sumber datanya. Kedua, agenda pembangunan berkelanjutan dan mitigasi/perubahan iklim memperluas ruang lingkup informasi yang diharapkan

dari pemerintah. Ke depan, akuntansi sektor publik tidak cukup berhenti pada pelaporan posisi keuangan dan realisasi anggaran, tetapi perlu mendukung pelaporan risiko, dampak, serta kinerja keberlanjutan yang relevan bagi pengambilan keputusan publik.

Berbagai studi sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa penerapan akrual di pemerintah daerah sering kali kuat pada dimensi kepatuhan penyusunan laporan, namun lebih lemah pada pemanfaatan informasi akrual dalam pengendalian manajerial dan pengambilan keputusan. Misalnya, kajian tentang implementasi akrual di pemerintah daerah menunjukkan bahwa proses bisnis yang berjalan tidak selalu benar-benar akrual meskipun laporan akhirnya disajikan dalam format akrual (Yuliati, Yuliansyah, & Adelina, 2019). Selain itu, kapasitas pengendalian intern, kualitas rekonsiliasi, dan peran pengawasan internal menjadi faktor penting dalam mendorong kualitas implementasi standar akrual (Muhtar et al., 2020). Dengan demikian, fenomena yang muncul bukan hanya kesenjangan antara regulasi dan praktik, tetapi juga kesenjangan antara kualitas penyajian laporan dan kualitas pemanfaatan informasi akuntansi dalam tata kelola program pemerintah.

Data ringkasan hasil pemeriksaan juga memperlihatkan dinamika tersebut. IHPS I Tahun 2024 mencatat bahwa dari 546 LKPD tahun 2023 yang diperiksa, 493 pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (BPK RI, 2024). Capaian ini penting sebagai sinyal perbaikan kepatuhan dan penyajian, tetapi sekaligus memperlihatkan paradoks bahwa opini audit yang membaik belum selalu diikuti oleh perbaikan substantif dalam pengelolaan aset, kualitas belanja, efektivitas program, maupun konsistensi tindak lanjut rekomendasi audit. Dengan kata lain, terdapat ruang analisis yang lebih dalam untuk menjelaskan mengapa indikator formal akuntabilitas meningkat, tetapi nilai guna informasi akuntansi bagi pengambilan keputusan publik belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan *state of the art* tersebut, penelitian terdahulu cenderung mengkaji isu akrual, audit, dan digitalisasi secara terpisah. Sementara itu, perkembangan global menunjukkan adanya konvergensi isu, terutama ketika standar pelaporan keberlanjutan sektor publik mulai dikembangkan dan menuntut sistem akuntansi serta data pemerintah yang lebih luas. Oleh sebab itu, latar belakang masalah artikel ini tidak hanya terletak pada kebutuhan evaluasi penerapan basis akrual, tetapi juga pada kebutuhan membangun keterhubungan antara kualitas data keuangan, ekosistem pelaporan digital, dan tuntutan pelaporan keberlanjutan yang makin relevan bagi pemerintah daerah di Indonesia.

Artikel ini menawarkan solusi berupa sintesis literatur dan dokumen kebijakan untuk merumuskan kerangka integratif dan peta jalan implementasi. Tujuan penelitian adalah: (1) mengidentifikasi isu-isu terkini akuntansi sektor publik Indonesia periode 2015-2025 yang terkait dengan basis akrual, audit, digitalisasi, dan pelaporan keberlanjutan; (2) menjelaskan keterkaitan antarisu dan konsekuensinya bagi kualitas akuntabilitas; serta (3) menyusun rekomendasi peta jalan transformasi yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Akuntabilitas, *New Public Management*, dan nilai guna informasi akrual

Dalam konteks SAP, basis akrual memperkaya informasi melalui pengakuan aset, kewajiban, beban, dan pendapatan pada saat terjadinya transaksi/kejadian ekonomi. Informasi ini berpotensi meningkatkan kualitas analisis biaya layanan, perencanaan penggantian aset, serta pengendalian kewajiban. Namun, tanpa dukungan sistem, SDM, dan tata kelola yang memadai, akrual berisiko menjadi ‘*compliance exercise*’ yang menambah beban administrasi tetapi tidak menambah nilai keputusan.

## **2. Digitalisasi pelaporan, interoperabilitas, dan tata kelola data**

Literatur terbaru juga menyoroti kemunculan *data science*, AI, dan analitik sebagai faktor yang mengubah cara informasi keuangan diproduksi, diaudit, dan digunakan dalam sektor publik. Algoritma dapat membantu deteksi anomali, pemetaan risiko, dan evaluasi kinerja program; namun, sekaligus menimbulkan risiko bias, privasi, dan kurangnya transparansi model (Bianchi & Giovannoni, 2025). Karena itu, digitalisasi harus disertai tata kelola data (*data governance*) yang mencakup kualitas data, standar metadata, keamanan, dan akuntabilitas atas penggunaan data.

## **3. Pelaporan keberlanjutan sektor publik dan perkembangan standar global**

### **4. Kerangka konseptual integratif**

Berdasarkan literatur di atas, artikel ini menggunakan kerangka integratif yang memandang transformasi akuntansi sektor publik sebagai interaksi tiga lapis: (1) lapis standar dan kepatuhan (SAP/IPSAS, kebijakan akuntansi, serta mekanisme audit); (2) lapis sistem dan data (sistem informasi keuangan, interoperabilitas, kualitas data, serta keamanan); dan (3) lapis nilai guna dan dampak (*decision usefulness*, transparansi, akuntabilitas kinerja, serta pelaporan keberlanjutan). Kerangka ini menjadi dasar analisis pada bagian hasil dan pembahasan serta peta jalan rekomendasi.

## **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan artikel kajian konseptual berbasis studi literatur terstruktur (*structured literature review*) yang dipadukan dengan analisis dokumen kebijakan. Literatur review dipilih karena mampu memetakan perkembangan pengetahuan secara sistematis, mengidentifikasi tema dominan, dan merumuskan agenda riset maupun rekomendasi kebijakan (Snyder, 2019; Webster & Watson, 2002).

Sumber data terdiri dari: (1) artikel jurnal nasional dan internasional periode 2015-2025 yang membahas akuntansi sektor publik Indonesia atau isu global yang relevan (akrual, audit sektor publik, *digital reporting*, *data governance*, dan *sustainability reporting*); (2) dokumen regulasi/standar akuntansi pemerintah (misalnya PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013); (3) ringkasan hasil pemeriksaan/audit summary yang dipublikasikan lembaga audit eksternal; serta (4) dokumen organisasi internasional dan standar-setter terkait transformasi digital dan pelaporan keberlanjutan sektor publik (misalnya OECD dan IPSASB).

Prosedur pengumpulan data literatur dilakukan melalui penelusuran kata kunci berbahasa Indonesia dan Inggris (misalnya ‘*accrual accounting*’, ‘*government accounting standards*’, ‘*local government financial statements*’, ‘*public sector audit*’, ‘*digital reporting*’, ‘*open data*’, ‘XBRL’, dan ‘*public sector sustainability*’).

*reporting*') pada basis data yang lazim digunakan di bidang akuntansi dan administrasi publik. Kriteria inklusi meliputi relevansi langsung terhadap tema, keterlacakan sumber (*peer-reviewed* atau dokumen resmi), dan keterkinian (diutamakan 10 tahun terakhir).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan sintesis tematik. Setiap artikel/dokumen dikodekan ke dalam tiga klaster utama yang dibangun pada kajian pustaka: (1) kualitas penerapan akrual dan aspek kepatuhan; (2) digitalisasi sistem pelaporan serta tata kelola data; dan (3) pelaporan keberlanjutan serta integrasi informasi keuangan-nonkeuangan. Untuk menjaga kredibilitas analisis, dilakukan triangulasi peneliti melalui diskusi antar penulis terhadap hasil pengodean, serta *cross-check* temuan dengan dokumen kebijakan yang menjadi rujukan resmi. Hasil sintesis kemudian dituangkan dalam kerangka integratif dan peta jalan rekomendasi implementasi.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Pemetaan isu-isu terkini dan klaster tematik

Sintesis literatur dan dokumen kebijakan menunjukkan bahwa isu 'terkini' akuntansi sektor publik Indonesia dapat dipetakan ke dalam empat klaster besar: (1) konsolidasi penerapan basis akrual dan peningkatan kualitas informasi; (2) penguatan audit, pengendalian internal, serta tindak lanjut rekomendasi; (3) digitalisasi pelaporan dan tata kelola data lintas sistem; dan (4) perluasan cakupan pelaporan menuju keberlanjutan, termasuk pengungkapan risiko iklim dan keterkaitan dengan SDGs.

Keempat klaster ini saling berinteraksi. Penerapan akrual yang berkualitas membutuhkan data aset dan kewajiban yang valid; data tersebut semakin bergantung pada sistem informasi dan integrasi data. Di sisi lain, digitalisasi tanpa tata kelola dapat memperbesar risiko kesalahan atau manipulasi data. Ketika pemerintah mulai melaporkan informasi keberlanjutan, kebutuhan data semakin luas (misalnya emisi, aset rentan iklim, dan belanja adaptasi), sehingga menuntut pematangan akuntansi akrual, klasifikasi belanja, dan *assurance*.

Tabel 1. Ringkasan isu transformasi akuntansi sektor publik dan implikasinya.

Dimensi	Isu kunci	Risiko/masalah umum	Arah penguatan
Basis akrual (SAP)	Pengakuan dan pengukuran aset/kewajiban; konsistensi kebijakan akuntansi; keterkaitan dengan penganggaran.	Data aset belum mutakhir; akrual berhenti pada 'format laporan'; kualitas estimasi (penyusutan, provisi) bervariasi.	Penguatan manajemen aset; rekonsiliasi lintas sistem; pelatihan estimasi akuntansi; evaluasi nilai guna informasi.
Audit & akuntabilitas	Opini audit LKPD; temuan SPI dan kepatuhan; tindak lanjut rekomendasi; audit kinerja.	Opini baik belum otomatis mencerminkan akuntabilitas kinerja; tindak lanjut rekomendasi belum konsisten.	Integrasi pelaporan keuangan-kinerja; manajemen risiko; dashboard tindak lanjut; penguatan peran APIP.
Digitalisasi & data	Integrasi sistem keuangan; open data; standarisasi data (mis. XBRL); analitik dan AI	Interoperabilitas lemah; kualitas dan metadata data tidak seragam; risiko keamanan siber;	Kerangka tata kelola data; standar data dan API; penguatan keamanan;

	untuk deteksi anomali.	bias algoritma.	audit/assurance atas sistem dan algoritma.
Keberlanjutan	Pelaporan SDGs/iklim; pengungkapan risiko dan dampak; keterkaitan belanja dengan hasil lingkungan/sosial.	Data non-keuangan tidak terintegrasi; definisi indikator beragam; keterbatasan assurance.	Adopsi standar/kerangka pelaporan; integrasi indikator dengan akun/belanja; assurance bertahap dan kolaboratif.

## 2. Konsolidasi basis akrual: dari kepatuhan menuju nilai guna

Sejak penerapan SAP berbasis akrual diwajibkan, perhatian pemerintah daerah banyak tercurah pada kesiapan penyusunan laporan dan pemenuhan format. Literatur menunjukkan bahwa pada tahap awal, implementasi akrual sering terfokus pada output laporan keuangan, sementara proses akuntansi harian masih bercorak kas atau *semi-akrual* (Yuliati et al., 2019). Kondisi ini memunculkan ‘*kesenjangan implementasi*’ antara standar (yang menuntut pengakuan berbasis kejadian ekonomi) dan praktik administratif (yang ditopang prosedur penganggaran dan pertanggungjawaban kas).

Faktor yang berulang muncul sebagai penentu kualitas implementasi adalah: komitmen pimpinan, kompetensi SDM akuntansi, kualitas sistem informasi, serta efektivitas pengendalian internal. Studi Muhtar, Payamta, Sutaryo, dan Amidjaya (2020) menekankan peran audit internal pemerintah daerah dalam mendorong implementasi standar akrual, terutama melalui evaluasi kepatuhan, pembinaan, dan rekomendasi perbaikan proses. Temuan ini sejalan dengan gagasan bahwa akrual berkualitas memerlukan ‘tata kelola akuntansi’ yang mencakup kebijakan akuntansi, SOP, serta mekanisme review internal sebelum diaudit eksternal.

Dari perspektif nilai guna (*decision usefulness*), isu kunci akrual di pemerintah daerah adalah kualitas data aset dan kewajiban. Aset tetap pemerintah daerah umumnya besar dan tersebar, sehingga membutuhkan inventarisasi, penilaian, dan penyusutan yang konsisten. Ketika data aset tidak andal, laporan posisi keuangan menjadi kurang representatif, dan informasi biaya layanan menjadi bias. Oleh karena itu, konsolidasi akrual perlu berfokus pada integrasi manajemen aset (*asset management*) dan pencatatan akuntansi, termasuk rekonsiliasi data aset dengan data pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset.

## 3. Audit LKPD, pengendalian internal, dan akuntabilitas kinerja

Audit eksternal berperan sebagai mekanisme *assurance* atas kewajiban penyajian laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar. Tren meningkatnya opini WTP atas LKPD mencerminkan perbaikan pada dimensi tertentu, seperti kesesuaian SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. IHPS I Tahun 2024 mencatat 493 dari 546 LKPD tahun 2023 beropini WTP (BPK RI, 2024), yang menunjukkan perbaikan signifikan dibanding periode awal implementasi akrual.

Namun, literatur audit sektor publik mengingatkan bahwa opini audit lebih dekat dengan kualitas pelaporan keuangan daripada langsung merepresentasikan kualitas kinerja atau manfaat layanan publik. Penelitian tentang faktor yang memengaruhi opini audit di pemerintah daerah menempatkan pengendalian internal, kepatuhan regulasi, dan kapasitas pengelolaan aset sebagai determinan penting (misalnya Prawati & Murwaningsari, 2024). Temuan ini

mengimplikasikan bahwa penguatan SPI dan manajemen risiko harus menjadi agenda utama, bukan sekadar mengejar opini.

Isu yang sering luput adalah tindak lanjut rekomendasi audit. Siklus akuntabilitas baru lengkap ketika temuan dan rekomendasi ditindaklanjuti melalui perbaikan sistem dan pemulihan kerugian/ketidakpatuhan. Oleh karena itu, integrasi antara pelaporan keuangan, pelaporan kinerja, serta sistem pemantauan tindak lanjut menjadi penting. Dalam konteks transformasi digital, dashboard tindak lanjut berbasis data dapat membantu pimpinan memantau tren temuan, akar masalah, dan efektivitas perbaikan.

#### **4. Digitalisasi pelaporan: peluang keterbandingan dan tantangan tata kelola data**

Digitalisasi dalam akuntansi sektor publik biasanya dimulai dari otomasi proses akuntansi dan penganggaran melalui sistem informasi. Tahap berikutnya adalah integrasi data lintas fungsi (pengadaan, aset, pajak/retribusi, layanan), serta penyediaan data terbuka bagi publik. OECD menekankan bahwa strategi *digital government* bertujuan membuat pemerintah lebih terbuka, transparan, inovatif, partisipatif, dan terpercaya (OECD, 2024). Dalam konteks pelaporan keuangan, prinsip ini dapat diwujudkan melalui publikasi LKPD yang mudah diakses, dataset ringkas yang dapat diolah, dan metadata yang menjelaskan definisi akun secara konsisten.

Standarisasi pelaporan digital menjadi prasyarat keterbandingan. Dalam ekosistem pelaporan korporasi, XBRL digunakan luas untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan dan analisis data pelaporan (Tawiah & Borgi, 2022). Konsep ‘data yang dibaca mesin’ juga relevan untuk pemerintah: ketika laporan keuangan tersedia dalam format terstruktur, analisis lintas daerah (misalnya rasio belanja modal, beban pegawai, atau kualitas aset) dapat dilakukan lebih cepat dan transparan. Di sisi lain, standar *digital reporting* menuntut penetapan taksonomi, kualitas data, serta mekanisme validasi agar tidak terjadi distorsi informasi.

Perkembangan AI dan analitik menambah dimensi baru. Kajian tentang *data science* di akuntansi sektor publik menunjukkan potensi algoritma untuk meningkatkan deteksi risiko, efisiensi audit, dan ketepatan pengawasan, tetapi penelitian juga menyoroti kekurangan evidence empiris serta isu etika, bias, dan akuntabilitas model (Bianchi & Giovannoni, 2025). Artinya, transformasi digital perlu memadukan inovasi dengan prinsip kehati-hatian: audit atas sistem informasi, dokumentasi model, serta tata kelola akses data.

#### **5. Pelaporan keberlanjutan dan perluasan ruang lingkup akuntansi sektor publik**

Perluasan pelaporan menuju keberlanjutan terjadi karena risiko iklim, bencana, dan degradasi lingkungan berdampak langsung pada keuangan publik (misalnya belanja pemulihan, kerusakan aset, penurunan penerimaan). Di tingkat global, IPSASB mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan sektor publik dan menegaskan pentingnya informasi yang konsisten serta dapat diverifikasi (IPSASB, 2024a). IPSASB juga menerbitkan materi ringkas mengenai *Exposure Draft* standar pengungkapan terkait iklim (IPSASB, 2024b).

Bagi Indonesia, implikasinya adalah kebutuhan menghubungkan data keuangan dengan data non-keuangan. Misalnya, belanja adaptasi iklim perlu dapat ditelusuri dari klasifikasi belanja dan output program; aset yang rentan terhadap

banjir/rob perlu diidentifikasi dalam *register aset*; dan komitmen pembiayaan transisi energi dapat dipetakan dalam penganggaran multi-tahun. Tanpa integrasi ini, laporan keberlanjutan berisiko menjadi narasi yang tidak terverifikasi.

Pelaporan keberlanjutan tidak harus langsung berbentuk standar yang kompleks. Pemerintah daerah dapat memulai dari pengungkapan indikator kunci yang selaras dengan prioritas daerah dan SDGs lokal, lalu mengembangkan secara bertahap menuju pengungkapan risiko dan strategi, metrik, serta target yang lebih komprehensif. Dalam jangka menengah, *assurance* atas informasi keberlanjutan dapat dilakukan melalui kombinasi review internal dan pemeriksaan tematik.

## 6. Kerangka integratif dan peta jalan implementasi (2025-2030)

Berangkat dari empat klaster isu, peta jalan transformasi perlu disusun agar pemerintah daerah memiliki urutan prioritas yang realistis. Prinsip kuncinya adalah ‘membangun fondasi data sebelum memperluas ruang lingkup pelaporan’. Fondasi tersebut meliputi validitas data aset dan kewajiban, konsistensi kebijakan akuntansi, serta integrasi sistem yang memungkinkan rekonsiliasi otomatis. Setelah fondasi memadai, digitalisasi dapat diarahkan pada keterbandingan lintas daerah melalui standar data, dan selanjutnya pelaporan keberlanjutan dapat diperluas secara bertahap dengan dukungan *assurance*.

Selain aspek teknis, peta jalan juga harus memperhatikan kapabilitas SDM dan perubahan organisasi. Reformasi akuntansi sektor publik sering gagal bukan karena standar yang buruk, tetapi karena keterbatasan kompetensi, rotasi pegawai, dan lemahnya insentif penggunaan informasi. Karena itu, program pengembangan kapasitas sebaiknya menargetkan dua level: level teknis (akuntansi, manajemen aset, *data governance*) dan level manajerial (pemanfaatan informasi untuk keputusan dan pengendalian program).

Bukti empiris terbaru menguatkan pentingnya kapabilitas manusia dan konteks institusional. Rakhman dan Wijayana (2024) menemukan bahwa tingkat human development di suatu daerah berasosiasi dengan kualitas pelaporan (diukur melalui opini audit), meskipun terdapat indikasi bahwa aparatur yang lebih mampu juga dapat menggunakan pertimbangan akrual secara oportunistik dalam estimasi. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan SDM perlu dibarengi pengendalian intern, etika, dan pengawasan yang efektif agar peningkatan kapabilitas berujung pada akuntabilitas yang substantif, bukan sekadar perbaikan indikator formal.

Tabel 2. Peta jalan transformasi akuntansi sektor publik pemerintah daerah (2025-2030).

Tahap	Fokus	Output kunci	Indikator keberhasilan (contoh)
2025-2026 (Fondasi)	Validasi data aset/kewajiban; konsistensi kebijakan akuntansi; penguatan SPI; standarisasi kode akun/objek belanja.	Register aset terbaru; kebijakan akuntansi daerah; SOP rekonsiliasi; rencana penguatan APIP.	Selisih rekonsiliasi menurun; temuan SPI berulang turun; ketepatan waktu penyajian laporan meningkat.
2027-2028 (Integrasi)	Integrasi sistem lintas fungsi (pengadaan-	Integrasi data berbasis API; kamus data;	Jumlah re-entry menurun; kualitas data

	aset-keuangan); interoperabilitas; metadata dan kualitas data; keamanan siber.	kontrol akses; audit sistem informasi.	meningkat (error rate turun); insiden keamanan dapat dikelola.
2029-2030 (Nilai guna & perluasan)	Digital reporting terstruktur; analitik risiko; pengungkapan keberlanjutan bertahap; assurance informasi non-keuangan.	Pelaporan machine-readable; dashboard kinerja-belanja; laporan iklim/SDGs terintegrasi; mekanisme assurance tematik.	Pemanfaatan laporan untuk keputusan; keterbandingan lintas daerah; peningkatan kualitas pengungkapan keberlanjutan.

## 7. Implikasi teoretis dan praktis

Dari sisi teoretis, sintesis ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan akruar tidak dapat diukur hanya dari kepatuhan standar, melainkan dari nilai guna informasi dalam siklus penganggaran, manajemen aset, dan evaluasi kebijakan. Transformasi digital dan pelaporan keberlanjutan memperluas tuntutan tersebut: akuntabilitas publik bergerak menuju akuntabilitas berbasis data yang membutuhkan interoperabilitas dan tata kelola data yang kuat.

Dari sisi praktis, pemerintah daerah dapat menggunakan peta jalan untuk menyusun prioritas reformasi: menguatkan fondasi data akruar (aset/kewajiban), memperkuat pengendalian dan tindak lanjut audit, kemudian mengembangkan *digital reporting* terstruktur, dan secara bertahap memasukkan informasi keberlanjutan. Bagi lembaga pengawas, pendekatan ini membantu memfokuskan pembinaan pada akar masalah (data, sistem, kompetensi) alih-alih hanya mengejar indikator output seperti opini.

Implikasi lain adalah kebutuhan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Standardisasi data dan pelaporan digital membutuhkan koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, vendor sistem, serta komunitas akademik. Di area keberlanjutan, kolaborasi dengan sektor lingkungan, perencanaan pembangunan, dan statistik diperlukan agar definisi indikator dan metodologi pengukuran konsisten dan dapat diaudit.

Ruang riset lanjutan juga terbuka pada pengembangan model *assurance* yang sesuai bagi ekosistem pemerintah daerah, misalnya kombinasi review internal, pemeriksaan tematik, dan penggunaan analitik untuk pemilihan area risiko tinggi. Selain itu, diperlukan penelitian mengenai dampak publikasi data keuangan yang *machine-readable* terhadap partisipasi publik dan pengambilan keputusan di DPRD, termasuk bagaimana meningkatkan literasi data agar transparansi benar-benar menghasilkan akuntabilitas.

Secara implementatif, agenda paling dekat adalah memperkuat keterhubungan data antara penganggaran, akuntansi, dan kinerja. Integrasi ini penting agar analisis biaya program, evaluasi efektivitas belanja, dan pengungkapan keberlanjutan dapat ditelusuri (*traceable*) dari sumber data yang sama. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menata kamus data, memperjelas kewenangan pemilik data (*data owner*), serta menetapkan mekanisme *quality assurance* data sebelum data dipublikasikan.

## V. KESIMPULAN

Artikel ini menyintesis isu-isu terkini akuntansi sektor publik Indonesia periode 2015-2025 dengan menempatkan basis akrual, audit, digitalisasi pelaporan, dan pelaporan keberlanjutan dalam satu kerangka integratif. Temuan utama menunjukkan bahwa penerapan akrual cenderung kuat pada aspek kepatuhan penyusunan laporan, tetapi masih menghadapi keterbatasan pada pemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan dan manajemen aset. Peningkatan opini audit penting sebagai sinyal perbaikan, namun belum otomatis merepresentasikan akuntabilitas kinerja sehingga perlu integrasi pelaporan keuangan-kinerja dan penguatan tindak lanjut rekomendasi.

Digitalisasi memberi peluang besar untuk meningkatkan keterbandingan, ketepatan waktu, dan transparansi melalui pelaporan terstruktur serta analitik. Namun, tanpa tata kelola data yang memadai, digitalisasi dapat menimbulkan risiko kualitas data dan keamanan. Pada saat yang sama, perkembangan standar pelaporan keberlanjutan sektor publik di tingkat global membuka ruang bagi pemerintah untuk memperluas pengungkapan atas risiko dan dampak iklim/SDGs. Karena itu, agenda transformasi perlu bergerak dari ‘sekadar patuh’ menuju ‘bernilai guna’ dengan strategi bertahap: membangun fondasi data akrual, mengintegrasikan sistem dan tata kelola data, serta memperluas pelaporan dan *assurance* keberlanjutan secara progresif.

Keterbatasan artikel ini adalah sifatnya yang berbasis sintesis literatur dan dokumen kebijakan, sehingga belum menguji secara empiris penerapan peta jalan di satu daerah tertentu. Riset selanjutnya dapat melakukan studi kasus mendalam pada pemerintah daerah dengan tingkat kematangan digital yang berbeda, menguji hubungan antara kualitas data aset, interoperabilitas sistem, dan kualitas pengungkapan keberlanjutan terhadap keputusan anggaran dan kinerja layanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024* (IHPS I 2024).
- Bianchi, C., & Giovannoni, E. (2025). Data science and public sector accounting: Reviewing impacts on reporting, auditing and accountability practices. *Public Money & Management*. <https://doi.org/10.1080/09540962.2025.2529266>
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal Control—Integrated Framework* (COSO).
- International Public Sector Accounting Standards Board. (2024a). *Advancing public sector sustainability reporting standards* (Project page).
- International Public Sector Accounting Standards Board. (2024b). *IPSASB Sustainability Reporting Standards Exposure Draft 1: Climate-related disclosures*.
- Muhtar, M., Payamta, P., Sutaryo, S., & Amidjaya, P. G. (2020). Government accrual-based accounting standards implementation in Indonesia: The role of local government internal audit. *Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration*, 28(3). <https://doi.org/10.46585/sp28031107>

- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Recommendation of the Council on Digital Government Strategies*. OECD Legal Instruments.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). Open government data. In *Government at a Glance 2025*. OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Prawati, L. D., & Murwaningsari, E. (2024). Determinant factors of financial reporting quality in local government: The evidence from public sector in Indonesia. *Journal of Applied Finance and Accounting*, *11*(2). <https://doi.org/10.21512/jafa.v11i2.12469>
- Rakhman, F., & Wijayana, S. (2024). Human development and the quality of financial reporting among the local governments in Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, *56*, 100634. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2024.100634>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tawiah, V., & Borgi, H. (2022). Impact of XBRL adoption on financial reporting quality: A global evidence. *Accounting Research Journal*, *35*(6), 815–834. <https://doi.org/10.1108/ARJ-01-2022-0002>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. *MIS Quarterly*, *26*(2), xiii–xxiii.
- Yuliati, R., Yuliansyah, & Adelina, Y. E. (2019). The implementation of accrual basis accounting by Indonesia's local governments. *International Review of Public Administration*, *24*(2), 67–80. <https://doi.org/10.1080/12294659.2019.1603954>